**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017-2019**

**Oleh:Petrus Burago**

Prodi: Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta



Email[: Peterburago11@gmail.com](mailto:Peterburago11@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo pada tahun 2017-2019 dilihat dari (1) Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (2) Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal,(3) Analisis Rasio Efektivitas PAD, Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah,Analisis Rasio keserasian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komperatif, penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nagekeo, pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif komperatif dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Analisi Rasio efektivitas PAD, Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah,Analisis Rasio Keserasian. Hasil penelitian ini

(1) Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dapat dikategorikan rendah sekali dengan rata-rata 6,4%%, (2) Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, menunjukan bahwa pertumbuhan dengan rata-rata 6,0%, (3) Analisi Rasio Efektivitas PAD , dapat dikategorikan dengan rata-rata 105%, Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dapat dikategorikan dengan rata-rata 85,16%, Analisis Rasio Keserasian di lihat dari belanja Operasi dapat dikategorikan dengan rata-rata

66,7% sedangkan di lihat dari Belanja Modal dikategorikan dengan rata-rat 27,9%.

**Kata Kunci : Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal,Efektivitas PAD, Efisiensi Keuangan Daerah, Keserasian , Otonomi Daerah**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Otonomi daerah merupakan suatu lngkah awal menuju Pembangunan Ekonomi Daerah yang lebih berdaya tumbuh tinggi dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Daerah di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Otonomi Derah membawa konsekuensi pada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas yang menjadi prinsip dasar otonomi adalah otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab prinsip ini memperhatikan aspek demokrasi partisipasi, adil dan merata dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman daerah

**B. Rumusan masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana kemampuan keuangan daerah kabupaten Nagekeo dalam mendukung pelaksanaan otonomi Daerah tahun 2017-2019?.

**C. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini lebih terfokus pada :

1. Penelitian ini dibatasi hanya membahas tingkat kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Nagekeo tahun anggaran 2017-2019 dengan menggunakan beberapa rasio di antaranya : ,rasio derajat desentralisasi fisikal, rasio kemandirian

rasio keserasian sebagai variable dependen dan variable independennya adalah

Otonomi daerah.

2. Lokasi penelitian di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nagekeo yang berada di Jalan Mohamad Hatta Mbay Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Periode penelitian dari tahun 20017-2019.

**D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah di kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah tahun

2017-2019.

**E. Manfaat penelitian**

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a) Manfaat penelitian bagi pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam penyusunan

c) Manfaat penelitian bagi Peneliti, menambah pengetahuan tentang kemampuan keuangan daerah dan seberapa besar tingkat kemandirian daerah khususnya di Kabupaten Nagekeo

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian di bidang keuangan daerah dan secara umum bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan keuangan daerah di Kabupaten Nagekeo.

**F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan diuraikan secara garis besar dalam setiap bab, diharapkan memberikan sedikit gambaran mengenai skripsi ini yang terbagi menjadi

5 (lima) bagian.

**LANDASAN TEORI**

A. **LANDASAN TEORI**



**1. Otonomi Daerah**

**a. Pengertian otonomi daerah**

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5,menjelaskan tentang pengertian otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Sumparmoko (2002) mengartikan Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sesuai dengan penjelasan undang undang No.32 tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan Otonomi Daerah dan Kabupaten/Kota didasarkan kepada desenterlisasi dalam wujud otonomi yang luas,nyata dalam bertanggung jawab.

**b. Daerah Otonom**

Dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa daerah otonomi selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sebdiri berdasarkan aspiransi masyarakat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ibrahim (1991), daerah otonom adalah bagian organis dari pada Negara, maka daerah otonom mempunyai kehidupan sendiri yang bersifat mandiri dengan kata lain tetap terikat dengan Negara Kesatuan. Daerah Otonom ini merupakan masyarakat hukum yaitu berhak mengatur dan mengurus Rumah Tangga Sendiri.

**a.) Tujuan otonomi daerah**

(Mardiasmo, (2002) Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah

**b.)Prinsip otonomi daerah**

Menurut penjelasan Undang-Undang No.32 tahun 2004 prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek Demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggun jawab

3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakan pada daerah dan kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas

4. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara puat dan daerah

**2. Keuangan Daerah**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tertera pada UU Pasal 1 ayat 5 PP No 2005 Keuangan daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak lain sesuai peraturan perundang yang berlaku (Halim, 2010;23).

**a) Kemampuan keuangan daerah**

Kriteria penting yang lain untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemapuan daerah dalam bidang keuangan.

**b) Pengelolaan penerimaan daerah**

Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal 157 dan UU No. 33 tahun 2004 pasal 6, serta PP No. 105 tahun 2000 dan PP No 64 tahun 2000, sumber-sumber penerimaan.

**c.) Pengelolaan pengeluaran daerah**

Dalam peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah periode tahun anggaran bersangkutan yang meliputi belanja rutin (operasional) , belanja pembangunan (belanja modal) serta pengeluaran tidak disangka

**d.)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Belanja adalah sesuia dengan ruang lingkup kegiatan yang menjadi tugas didaerahnya. dalam UU No. 33 pasal 1 ayat 17, menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah

**e.) Analisis Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam mengadakan analisis keuangan memerlukan ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan adalah Rasio.

**f.) Rasio kemandirian keuangan daerah**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan Pemerintah,pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah

**g.) Rasio derajat desentralisasi fiscal**

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai Pembangunan

**h.) Rasio efisiensi**

Rasio Efisiensi merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah

**i.) Rasio keserasian**

Keserasian ini menggambarkan bagaiman pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

**j.) Rasio efiktifitas**

Halim (2012) menyatakan bahwa rasio efektivitas menggambarkan Kemampun Pemerintah Daerah dalam merelalisasikan PAD yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill Daerah.

B. **Penelitian Terdahulu**



Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya Tentang Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7**

**Perbandingan Hasil Penelitian**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Penelitian**  **Terdahulu** | **Judul**  **Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1 | Ermhita Savitry (2011) | Analisis kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun 2007-  2011 di kota  Makassar. | Hasil penelitian dalam penelitian terdahulu menunjukan rasio kemandirian keuangan daerah yang memperoleh hasil rata-rata sebesar  18,30% atau berada pada pola instruktif. rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio indeks kemampuan rutin yang menunjukan kemampuan  keuangan daerah masih kurang. Pada rasio keserasian, pengeluaran belanja rutin lebih besar di bandingkan dengan belanja pembangunan. rasio pertumbuhan secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang negatif karena peningkatan PAD dan total pendapatan daerah tidak diikuti oleh pertumbuhan belanja pembangunan tetapi diikuti oleh pertumbuhan  belanja rutin |
| 2 | Sanny  Wurangian  (2017) | Analisis kemampuan  keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di kota  Tomohon | Hasil analisis deskriptif secara umum menunjukan masih kurangnya tingkat  ketidakmampuan kota Tomohom dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD) yang menyebabkan masih kurangnya tingkat kemandirian serta kurangnya efisiensi dalam merealisasikan pengeluarannya. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Muhamad Nur Afandi (2012) | Analisis kemampuan keuangan daerah dalam  menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Labuhan Batu  Selatan | Hasil penelitian menunjukan kemampuan keuangan daerah kabupaten Labuhan Batu Selatan masih sangat rendah dan belum mampu menunjang pelaksanaan otonomi daerah, tetapi pemerintah Kabupaten Labuan Batu Selatan bisa melaksanakan tugas pemerintah, yaitu penyediaan pelayanan public dan  pembangunan dengan cukup baik. |

*Sumber : Olahan Peneliti, 2020*

C. **Kerangka Pemikiran**



Kerangka pemikiran kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan.dalam menjalankan otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan yang mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing Daerah

**METODE PENELITIAN**

**A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. menurut Made Winarta (2011) deakriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan. penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran tentang kemampuan keuangan daerah di kabupaten Nagekeo dalam melaksanakan otonomi daerah

**B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nagekeo yang berada di Jalan Mohamad Hatta Mbay.

**C. Jenis Data dan Sumber Data**

**1. Jenis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Data Kualitatif

Menurut Sugiyono (2010) data kualitatif yaitu data yang berupa kata,gambar, dan sekma. data kualitatif adalah data yang menekankan pada

aspek suatu pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan peneliti generalisasi.

b. Data Kuantitatif

Menurut Sugyono (2010) data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka dan berlandaskan pada filsafat postivisem, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel. data kuantitatif yang diambil dalam penelitian ini adalah berupa angka-angka dalam Menganalisis kemampuan keuangan daerah kabupaten nagekeo dalam melaksanakan otonomi daerah.

**2. Sumber Data**

Dilihat dari segi cara untuk teknik pengumpulan data tergolong menjadi dua bagian ( Sanusi,2015;104)

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Umum Kabupaten Nagekeo**

Kabupaten Nagekeo merupakan Kabupaten baru, sebagai pemekaran Kabupaten Ngada, yang diresmikan pembentukannya pada tanggal 22 mei 2007 melalui UU No 02 tahun 2007. Peresmian dilakukan pada hari selasa tanggal 22 mei

2007 oleh pejabat Mendagri Widodo A. S. dan Drs. Elias Djo ditunjuk sebagai pejabat bupati dan pusat pemerintahan Kabupeten Nagekeo berlokasi di Mbay. Kabupaten Nagekeo terletak pada koordinat 121010’48”-121024’4’’ bujur timur dan

8026’15”-8040’0’ lintang selatan. Bagian utara berbatasan dengan laut flores, bagian selatan berbatasan dengan laut sawu, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Ende dan bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Ngada.

**B. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset**

**Daerah Kabupaten Nagekeo.**

**1. Visi dan Misi Kabupaten Nagekeo**

a. Visi Kabupaten Nagekeo

”Menjadi Institusi yang Terpercaya dan Handal dalam Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Terbaik”

b. Misi Kabupaten Nagekeo

Dalam Rangka mewujudkan harapan yang terkandung dalam visi Badan Keuangan Daerah maka perlu dirumuskan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujutkan proyeksi kondisi tentang masa depan. Selaras dengan visi yang telah dirumuskan bersama, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo telah merumuskan dan menetapkan misi untuk periode tahun 2013-2018

**2. Tujuan dan Sasaran**

Berpedoman pada visi dan misi sebagaimana tersebut diatas, terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh badan keuangan daerah selama 5 (lima)

**3. Strategi dan Kebijakan**

Menurut teori pengembangan straregi pada analisis SWOT, terdapata empat macam tipe umum strategi menuju keberhasilan organisasi

**4. Fungsi dan Tugas Pokok**

Berdasarkan peraturan Bupati Nagekeo nomor 68 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten nagekeo nomor 2 tahun 2008 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja badan keuangan daerah kabupaten Nagekeo

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberi gambaran mengenai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo periode 2017 sampai 2019 . dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, kesimpulan yang dapat diambil atau dikemukan yaitu kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nagekeo dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah tahun 2017-2019 dengan menggunakan beberapa rasio di antaranya: rasio derajat desentralisasi fisikal,rasio kemandirian keuangan daerah,rasio efektifitas PAD,rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian kurang berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adi, P.H. 2012. Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi dan Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin.* Vol 21. No 1 : 1-9.

Bisma, I.D.G., Susanto, H. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. Jurnal Gane Swara edisi Khusus* Vol 4. No 3. Mataram.

Budiarto., Bambang. 2011. *Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan*

*Daerah. Seminar Ekonomi Daerah.* Surabaya*.*

Dwi, S.A. 2010. Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Derajat Derajat Otonomi Pemerintahan Provinsi di Seluruh Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan* Vol 12. No 1 (Maret): 91-117.

Farian., Endi. 2010. *Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten X.* Skripsi. M, Ponorogo.

Halim, A. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah –Akuntansi Sektor Publik Edisi 4.*

Jakarta. Salemba Empat.

Indra. 2011. *Asas-Asas Otonomi Daerah.* Artikel. [http://elfi-indra](http://elfi-indra/).

Blogspot.com/2011/06/asas-asas otonomi daerah html. Hal 1. Diakses tanggal 9 Januari 2017.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.* Jakarta. Penerbit Salemba Empat.

Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua.*

Yogyakarta. ANDI.

Pemerintah. R.I. 2002. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105 Tahun*

*2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggunjawaban Keuangan*

*Daerah*,Jakarta.

Prihatiningsih, A. 2010. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan*

*Otonomi Daerah di Kota Surakarta.* Skripsi. SM, Surakarta.

Rahmatina, A.Z.N. 2011. *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2009.* Skripsi. Institut Manajemen Telkom Bandung.